

**POLA HUBUNGAN CIVIL SOCIETY DAN  
PEMERINTAH LOKAL**

*(Studi Kasus Kegiatan NGO dalam Mendorong Keterbukaan  
Informasi Publik di Kota Mataram Tahun 2011-2015)*

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar dalam Magister Ilmu Pemerintahan

**TESIS**



**OLEH:  
AYATULLAH HADI  
NIM: 20141040040**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya kembali kepada Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia-Nya, tesis dengan judul “Pola Hubungan *Civil Society* dan Pemerintah Lokal (*Studi Kasus Kegiatan NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram Tahun 2011-2015*)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc selaku pembimbing dan Direktur Pascasarjana UMY atas bimbingan, arahan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan saat ujian proposal dan ujian tesis.
3. Bapak Eko Priyo Purnomo, M.Res.,Ph.D yang telah memberikan saran dan kritik yang berarti saat ujian tesis khususnya tentang pendekatan analisa *stakeholders* sehingga memperkaya pembahasan tesis ini.
4. Ibu Dyah Mutiarin, M.Si selaku Ketua Prodi MIP UMY yang telah memberikan jalan keluar sehingga mempermudah pengesahan tesis ini.

5. Lalu Ahyar Supriadi, SH selaku Direktur Somasi dan Dwi Ari Santo selaku Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan diskusi mengenai kiprah NGO, khususnya Somasi NTB, dalam mendorong KIP.
6. Rekan-rekan sejawat dan para aktivis Fitra NTB, Pemuda Muhammadiyah NTB, Lakpesdam NU Kota Mataram dan para penggawa Rinjani Institut NTB yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi setiap waktu dan tempat. Terimakasih atas motivasi serta dorongan semangatnya selama ini.
7. Teman dan semua sahabat MIP angkatan 08 dan 09 dari seluruh penjuru negeri.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu, semoga senantiasa diberikan limpahan rahmat-Nya.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik semua pihak penulis harapkan untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Yogyakarta, Mei 2017

Penulis,

AYATULLAH HADI

## DAFTAR ISI

### **BAB I: PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	8
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

II.1 Kajian Pustaka .....	11
II.2 Kerangka Teori .....	23
a. Civil society .....	23
b. Hubungan Politik <i>Civil Society</i> dan Pemerintah Lokal .....	47
II.3 Kerangka Pemikiran .....	77
II.4 Definisi Konseptual .....	79
II.5 Definisi Operasional .....	81

### **BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Jenis penelitian .....	85
III.2 Lokasi penelitian .....	86
III.3 Jenis data .....	87
III.4 Teknik Pengumpulan Data .....	90
III.5 Unit analisis data .....	94
III.6 Teknik penganbilan Narasumber .....	95
III.7 Teknik analisis data .....	96

### **BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

IV.1 Deskripsi Wilayah Penelitian .....	98
---	----

IV.2 Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram .....	102
IV.3 Keterbukaan Informasi Publik .....	105
IV.4 Profil NGO .....	109
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
V.1 Pola Hubungan Civil Society dan Pemerintah	
Lokal dalam Mendorong Keterbukaan Informasi	
Publik .....	124
<b>V.1.1 Dimensi Orientasi Isu .....</b>	<b>125</b>
a. Mempengaruhi Agenda Pemerintahan .....	126
b. Mempengaruhi aktivitas lembaga .....	145
<b>V.1.2 Dimensi Finansial.....</b>	<b>162</b>
a. Sumber dan Kemandirian Keuangan .....	163
b. Alokasi Keuangan Lembaga .....	171
<b>V.1.3 Dimensi Kebijakan .....</b>	<b>180</b>
a. Strategi Pemecahan Masalah.....	181
b. Partisipasi Publik .....	193
<b>V.1.4 Dimensi Organisasional.....</b>	<b>199</b>
a. Interdependensi .....	200
b. Independensi .....	212
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
VI.1 Kesimpulan .....	228
VI.2 Saran.....	236
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>239</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Indonesian Governance Index (Arena Pemerintahan, Birokrasi, Civil Society dan Masyarakat Ekonom .....	4
Tabel II.1	Kajian Pustaka .....	20
Tabel II.2	Teori Arus Utama Civil Society .....	29
Tabel II.3	Fungsi dan Peran Civil Society.....	37
Tabel II.4	Dimensi Hubungan Politik Civil Society dan Pemerintah Lokal .....	55
Tabel II.6	Indikator Hubungan Politik Civil Society dan Pemerintah Lokal .....	83
Table III.1	Data Primer Penelitian .....	88
Tabel III.2	Data Skunder Penelitian.....	89
Tabel III.3	Kategori Interpretasi .....	94
Tabel III.4	Unit Analisa Data .....	94
Tabel 4.1	Batas-Batas Wilayah Kota Mataram.....	99
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan .....	100
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kota Mataram .....	101
Tabel V.1	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan NGO untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi .....	129
Tabel V.2	Surat Kabar dan Media Online .....	132

Tabel V.3	Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik Surat Kabar dan Media Online Berdasarkan Topik Berita .....	133
Tabel V.4	Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik Surat Kabar dan Media Online Berdasarkan Subjek Berita.....	134
Tabel V.5	Sajian Data Isi Berita Keterbukaan Informasi Publik Surat Kabar dan Media Online Berdasarkan Arah Berita.....	136
Tabel V.6	Tanggapan Responden Tentang Aktifitas NGO dalam Mendorong Isu Keterbukaan Informasi Publik .....	151
Tabel V.8	Aktivitas NGO Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Permohonan Informasi .....	154
Tabel V.9	Nilai Dimensi Orientasi Isu .....	159
Tabel V.10	Tanggapan Responden Tentang Sumber Pendanaan Internasional dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	166
Tabel V.11	Tanggapan Responden Terhadap Kemandirian Keuangan NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	170
Tabel V.12	Keuangan Program Somasi NTB yang didukung Lembaga Donor Internasional .....	172

Tabel V.13	Tanggapan Responden Tentang Kejelasan Alokasi Keuangan NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	175
Tabel V.14	Nilai Dimensi Finansial .....	177
Tabel V.15	Matrik Strategi dan Krangka Output NGO dalam Tanggapan Responden Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Kota Mataram.....	183
Tabel V.16	Instansi Pemerintahan Provinsi NTB yang Telah Membentuk PPID .....	188
Tabel V.17	Tanggapan Responden Tentang Strategi Pemecahan Masalah dalam Mengatasi Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	191
Tabel V.18	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	194
Tabel V.19	Nilai Dimensi Kebijakan .....	197
Tabel V.20	Tanggapan Responden Terhadap Interdependensi NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	201
Tabel V.21	Analisa Stakeholders dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram .....	202



Tabel V.22	Tanggapan Responden Terhadap Independensi NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik .....	215
Tabel V.23	Nilai Dimensi Organisasional .....	216

## **GAMBAR**

Gambar II.1	Starategi Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Kebijakan.....	46
Gambar II.2	Pola Hubungan Civil Society dan Pemerintah Daerah.....	47
Gambar II.3	Model Ruang Publik Hubungan Negara dan civil society.....	51
Gambar II.4	Pola Hubungan Civil Society dengan Negara ...	52
Gambar II.5	Kerangka Pemikiran .....	78
Gambar III.1	Komponen Analsis Data Model Interaktif .....	96
Gambar IV.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Mataram.....	100
Gambar V.1	Berita tentang Kinerja Pelayanan Informasi Oleh Badan Publik .....	138
Gambar V.2	Berita Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Berita Positif.....	139
Gambar V.3	Berita Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Subjek Berita .....	141
Gambar V.4	Portal Sistem Informasi Publik (SIP) Kota Mataram.....	144
Gambar V.5	Skema Sumber Keuangan Dan Akuntabilitasnya Berdasarkan AD/ART NGO.....	164
Gambar V.6	Skema Sumber Pendanaan NGO Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi di Kota Mataram.....	168
Gambar V.7	Independensi Kegiatan NGO dalam Memdorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram.....	203
Gambar V.8	Matriks Nilai Penting dan Pengaruh Stakeholders Pada Dimensi Isu KIP .....	216
Gambar V.9	Matriks Nilai Penting dan Pengaruh Stakeholders Pada Dimensi Kebijakan dalam Mendorong KIP.....	224

## DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
ART	: Anggran Rumah Tangga
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
IGI	: Indonesia Government Index
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KUA-PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Lakpesdam	: Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NU	: Nahdlatul ‘Ulama
PD	: Pimpinan Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PERWAL	: Peraturan Walikota
POKJA	: Kelompok Kerja
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SETDA	: Sekretariat Daerah
SLIP	: Standar Layanan Informasi Publik
SOMASI	: Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi
SOP	: Strandar Operasional Prosedure
UUD	: Undang-Undang Dasar